

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *hakam* di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan kesimpulan bahwa Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi sulit membedakan bagaimana perkara yang masuk dalam kategori *syiqaq* dan perselisihan biasa dan banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi salah satunya Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi memukul rata terhadap perkara perceraian alasan *syiqaq* dengan alasan perceraian huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pengaturan mengenai *hakam* dan *syiqaq* ini masih umum, belum diperjelas dalam Undang-Undang ataupun instrument Peraturan lainnya tentang syarat-syarat *hakam* dan tata cara pengangkatan *hakam* dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* itu sendiri.

Kata Kunci: Keberadaan, *Hakam*, *Syiqaq*.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the existence of hakam in syiqaq cases in the Class 1A Religious Courts of Jambi City and the factors that influence the existence of hakam in the Class 1A Religious Courts of Jambi City. The method used in this thesis is Empirical Juridical Research. As a result of the research carried out, the author found the conclusion that in practice in the Class 1A Religious Court of Jambi City, it is difficult to differentiate how cases fall into the category of syiqaq and ordinary disputes and there are many factors that influence the existence of judges in syiqaq cases in the Class 1A Religious Court of Jambi City, one of which is The Class 1A Religious Court of Jambi City held a general hearing regarding the divorce case for syiqaq reasons with the reasons for divorce hulu F Perratulran Permelintah No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Undang-Undang Number 1 of 1974 concerning Marriage and Legal Protections involving the rights and syi This qaq is still ulmulm, bellulm is explained in Undang-Undang or other instrumelnt regulations regarding the requirements of the Hakam and the procedures for appointing the Hakam in resolving the shiqaq case itself.

Keywords: *Existence, Hakam, Syiqaq.*